



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

Pemprov Maksimal Bantu Rakyat dengan Anggaran Rp2 Triliun

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu matangkan prosedur peminjaman anggaran hingga Rp2 triliun ke Bank Jawa Barat (BJB) untuk memaksimalkan program Bantu Rakyat. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. Herwan Antoni, S.KM, M.Kes, M.Si menerangkan saat ini Pemprov Bengkulu terus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat terutama pada sektor pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan hingga kesehatan.

Atas minimnya anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu, saat ini Pemprov Bengkulu tengah melakukan koordinasi untuk menjalankan skema pinjaman daerah kepada BJB hingga Rp2 triliun. “Kita sudah mempersiapkan dan sudah bertemu langsung dengan Dirut BJB. Selain itu, kita juga sudah dua kali melakukan pertemuan melalui zoom meeting dengan perwakilan BJB,” ungkap Herwan.

Herwan menjelaskan saat ini, regulasi memungkinkan daerah mengajukan pinjaman antarbank pemerintah tanpa proses yang panjang dan ribet. Sehingga hal itu memudahkan untuk dilakukan antara daerah dan bank pemerintah daerah lainnya. Lebih jauh, Herwan menyampaikan setelah ada kesepakatan dengan BJB, pembahasan akan dilanjutkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Rencana (pinjaman, red) Rp2 triliun ini difokuskan untuk program strategis, terutama pembangunan jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, termasuk pengadaan ambulans gratis,” jelas Herwan.

la menambahkan, kebutuhan riil pembangunan di Bengkulu mencapai Rp2,5 triliun. Namun, nilai pinjaman Rp2 triliun dipandang cukup realistis untuk mempercepat target pembangunan.

“Paling lambat 2027 seluruh infrastruktur di Bengkulu kita targetkan selesai. Prinsipnya, pinjaman ini untuk percepatan agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu, Dr. Anzori Tawakal, M.Si menyampaikan hal tersebut sangat dipersilahkan untuk dilakukan jika menilik asas manfaatnya. Terutama pada tujuannya ialah kesejahteraan masyarakat, disektor pembangunan infrastruktur jalan jembatan, pendidikan dan kesehatan, sudah seharusnya disambut dengan baik.

“Namun, hal ini harus ditilik lebih jauh dan disepakati bersama DPRD Provinsi Bengkulu secara koheren, sehingga pada pelaksanaannya benar-benar dilakukan,” paparnya.

Lebih jauh, Anzori juga mengingatkan agar wacana tersebut diketahui secara jelas, bagaimana Pemprov Bengkulu melakukan pembayarannya serta seperti apa dan berapa lama masa pembayaran atas peminjaman tersebut.

“Peminjaman ini tentunya memperbesar viskal daerah, namun perlu menjadi sorotan seperti apa regulasi, tenor hingga pembayaran, sehingga peminjaman ini tidak menghambat pelaksanaan program selanjutnya,” paparnya.

Tidak hanya itu, Ansori juga menilai agar pembayaran atas peminjam tersebut dibayarkan menggunakan hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Apakah pembayarannya menggunakan DAU atau akan lebih baik dibayarkan dengan PAD kita sendiri,” terangnya. (rno)